

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi juga berkembang semakin pesat setiap harinya. Perkembangan teknologi yang terjadi berpengaruh pada perubahan gaya hidup serta perilaku masyarakat. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemajuan teknologi yang selalu mengalami pembaruan dapat memengaruhi perkembangan seluruh sektor lainnya, termasuk sektor ekonomi. Kemajuan teknologi dalam sektor ekonomi seringkali disebut dengan digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ekonomi yang terjadi menandai dimulainya sebuah revolusi industri baru yang terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang tidak luput dari digitalisasi ekonomi yang terjadi. Digitalisasi ekonomi di Indonesia berbanding lurus dengan tingkat penggunaan internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (Rahayu, et al., 2023).

Dalam era 4.0 yang tengah berjalan saat ini, Indonesia memiliki potensi perkembangan digital dalam beberapa sektor yang mampu mendorong perekonomian negara. Salah satu sektor tersebut adalah sektor keuangan yang telah banyak beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Salah satu industri yang meliputi sektor keuangan adalah industri perbankan. Saat ini, industri perbankan telah mencakup layanan yang melibatkan teknologi yaitu layanan yang berbasis digital. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila berbagai macam layanan aplikasi keuangan digital mulai bermunculan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi terkait bisnis maupun pembelian barang serta jasa.

Salah satu bagian penting yang melekat pada kegiatan transaksi pembayaran yang berlangsung di masyarakat

adalah sistem pembayaran yang diberlakukan. Saat ini, masyarakat mulai lebih tertarik kepada penggunaan pembayaran non-tunai atau pembayaran digital. Pembayaran bentuk ini dianggap lebih efektif dan efisien bagi sebagian masyarakat yang sudah terbiasa dengan digitalisasi. Bank Indonesia mencatat bahwa volume penggunaan pembayaran non-tunai naik sepanjang tahunnya sejak tahun 2012 – 2021 (Bank Indonesia, The Red Book Statistics, 2021). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kini berupaya untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pembayaran non-tunai.

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang masih menghadapi tantangan inklusivitas keuangan yang cukup signifikan. Hal ini diketahui dari tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk melakukan transaksi serta jasa layanan bank. Bahkan, tercatat 70% masih belum menggunakan layanan perbankan (Rah, 2023) Oleh karena itu, peningkatan fasilitas dalam penggunaan pembayaran digital diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan perbankan dengan langkah – langkah yang lebih praktis. Peningkatan layanan keuangan digital diperlukan untuk mendorong inklusivitas keuangan ASEAN.

Pada tahun 2022 lalu, Indonesia memegang presidensi forum ekonomi G20. G20 merupakan sebuah forum kerjasama ekonomi yang beranggotakan 19 negara utama dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% perdagangan dunia (Bank Indonesia, 2022). Presidensi G20 dipegang oleh salah satu negara anggota yang berganti setiap tahunnya. Indonesia memegang presidensi G20 selama satu tahun, dimulai dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Selama presidensi G20, Indonesia mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*” yang berfokuskan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Melalui tema tersebut,

transformasi digital menjadi salah satu sektor prioritas yang dinilai mampu menjadi kunci untuk memulihkan keadaan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Indonesia berfokus kepada peningkatan kemampuan digital (*digital skills*) serta literasi digital (*digital literacy*) untuk memastikan inklusivitas transformasi digital yang dapat dinikmati di seluruh negara dunia (Kementerian Luar Negeri, 2022).

Indonesia selaku tuan rumah memanfaatkan momentum G20 untuk mengangkat topik transformasi digital sebab selama pandemi, digital ekonomi merupakan sektor yang berkembang paling pesat. Melalui rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali, Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) melakukan kerjasama dengan 5 negara ASEAN terkait dengan konektivitas pembayaran digital atau *Regional Payment Digital Connectivity*. Bank Indonesia selaku bank sentral negara Indonesia menginisiasi kerjasama dengan keempat bank sentral negara lainnya untuk mewujudkan konektivitas sistem pembayaran di wilayah Asia Tenggara. Inisiatif kerjasama terkait *Regional Payment Digital Connectivity* diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi sektor ekonomi, khususnya pada sektor pariwisata perdagangan sebab kemudahan dalam sistem pembayaran akan menarik wisatawan untuk membelanjakan uang mereka di negara tersebut. Kerjasama antara kelima negara ASEAN juga dilakukan sebagai langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi di masing – masing negara pasca terjadinya pandemi Covid-19.

Pada 1 Januari 2023, Indonesia secara resmi menjadi ketua dari ASEAN. Di tahun yang sama, diadakan KTT ASEAN Ke-43 yang diselenggarakan di Bali. Dalam KTT tersebut, isu terkait transformasi digital yang sebelumnya telah diangkat oleh Indonesia dalam forum G20 ditindaklanjuti, terutama dalam pengembangan konektivitas pembayaran digital. Keterlibatan Indonesia dalam memimpin terjadinya transformasi digital didukung

dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan 2400 startup dan penetrasi internet yang mencapai 76,6 persen. Selain itu, Indonesia juga memiliki nilai ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai US\$ 130 miliar pada 2025 dan akan terus tumbuh hingga mencapai US\$ 315 miliar pada 2030 (Putri R. S., 2023).

Perkembangan perekonomian ASEAN tidak lepas dari peran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN. Tujuan pembentukan MEA adalah meningkatkan stabilitas perekonomian ASEAN serta mengatasi permasalahan yang muncul dalam bidang ekonomi antar negara ASEAN. MEA memiliki empat pilar yang diantaranya adalah pasar dan berbasis produksi tunggal, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global. Keempat pilar tersebut tercantumkan dalam dokumen cetak biru (*blueprint*) yang disepakati dalam *ASEAN Economic Minister Meeting* (AEM) pada Agustus 2006. Pada tahun 2015, Cetak Biru MEA 2025 disetujui oleh negara anggota ASEAN. Dalam Cetak Biru tersebut, terdapat lima karakteristik, yaitu: ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh; ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis; peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral; ASEAN yang Tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan ASEAN yang global (Sekretariat Nasional ASEAN, 2017). Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pilar dan karakteristik yang tercantum dalam Cetak Biru tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Memasuki era digital, Indonesia turut serta dalam mewujudkan peningkatan ekonomi digital ASEAN. Pewujudan digital ekonomi ASEAN ini sejalan dengan karakteristik MEA yang bertekad untuk mewujudkan perekonomian ASEAN yang inklusif.

ASEAN merupakan sebuah kawasan yang memiliki integrasi ekonomi yang sudah cukup kuat dalam akses pasar untuk barang fisik, meskipun begitu hal yang sama tidak terjadi dalam integrasi pasar digitalnya yang masih lemah. Lemahnya pasar digital di ASEAN bisa dilihat dari belum adanya sebuah perjanjian ekonomi digital (*Digital Economy Agreement (DEA)*) yang ditandatangani oleh seluruh anggota ASEAN. Komitmen ASEAN mengenai transformasi digital kebanyakan dituangkan dalam berbagai perjanjian bebas (*Free Trade Agreement*) Konvensional. Pada tahun 2021 pasca terjadinya Covid-19, ASEAN mulai menyusun *ASEAN Digital Masterplan (ADM) 2025* untuk mempercepat integrasi dan transformasi digital (Hasran & Taushia, 2024). ADM 2025 memiliki tujuan utama untuk menjadi ASEAN sebagai komunitas digital kawasan dengan ekonomi terdepan yang didukung dengan layanan, teknologi, serta sistem digital yang aman dan transformatif. Pada tahun 2022, para pemimpin negara anggota ASEAN setuju untuk menandatangani Peta Jalan Bandar Seri Begawan, juga dikenal sebagai BSBR, yang mewajibkan mereka untuk memulai perundingan *Digital Economy Framework Agreement (DEFA)* ASEAN. DEFA ini ditandatangani pada KTT Ke – 43 ASEAN dibawah kepemimpinan Indonesia dan menjadi DEA pertama yang ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN.

DEFA menjadi sebuah perjanjian yang mencakup perjanjian mengenai digitalisasi, termasuk *digital talent, digital ID, keamanan siber, retraining, reskilling, infrastruktur, dan interoperabilitas* di ASEAN. Tujuan DEFA adalah untuk menciptakan landasan yang kuat bagi ASEAN untuk menjadi negara dengan ekonomi digital terkemuka, di mana peraturan, undang-undang, dan infrastruktur mendukung arus barang, jasa, dan keamanan data. Indonesia sebagai negara dengan potensi digital terbesar di antara negara – negara ASEAN yang lain, dapat memanfaatkan terbentuknya DEFA untuk memaksimalkan potensi ekonomi digitalnya. Indonesia memerlukan

pendekatan yang tepat, salah satunya dengan mendorong kerjasama dalam sistem pembayaran digital ASEAN. Indonesia perlu mengadvokasikan interoperabilitas sistem pembayaran ASEAN yang memungkinkan pesertanya untuk melakukan transaksi tanpa menggunakan sistem pembayaran yang berbeda – beda. Hal ini akan membuat transaksi pembayaran dapat diselesaikan dengan lebih cepat, terjangkau, dan konsisten.

Indonesia memiliki nota kesepahaman terkait kerangka pembayaran menggunakan mata uang lokal yaitu *Local Currency Settlement* yang telah ditandatangani sejak tahun 2016 lalu. Dalam skema tersebut, Indonesia telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina. *Local Currency Settlement* merupakan sebuah kerangka penyelesaian transaksi bilateral yang menggunakan mata uang lokal masing – masing negara sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan yang dilakukan. *Local Currency Settlement* dibentuk oleh Indonesia dengan komitmen untuk menggunakan uang lokal negara sebagai alat tukar untuk transaksi ekspor dan impor dalam wilayah yuridiksi masing – masing negara. Skema kerjasama *Local Currency Settlement* yang telah dimiliki oleh Indonesia kemudian dikembangkan menjadi Skema *Local Currency Transaction* yang tidak hanya berpusat pada penggunaan uang lokal, tetapi juga pada pengaplikasian pembayaran digital.

Kebijakan ASEAN terkait digital ekonomi membuka peluang bagi Indonesia untuk turut serta dalam memaksimalkan potensi digitalnya yang tinggi. Indonesia memaksimalkan potensi ekonomi digitalnya dengan menawarkan kerjasama dengan negara ASEAN terkait interoperabilitas sistem pembayaran. Melalui nota kesepahaman *Local Currency Transaction*, Indonesia bekerja sama dengan negara – negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura dalam mengupayakan konektivitas pembayaran digital di ASEAN.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti terkait upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan konektivitas pembayaran digital di kawasan Asia Tenggara melalui keketuaan Indonesia di ASEAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Mendukung Terciptanya Digital Ekonomi ASEAN?”

C. Konsep dan Teori

1. Organisasi Regional

Mansbaach berpendapat bahwa *region* atau kawasan dapat dipahami sebagai sebuah pengelompokan regional yang dikategorikan melalui faktor kedekatan geografis, kebudayaan, perdagangan, dan interdependensi ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi dan keikutsertaan dalam organisasi Internasional (Hopkins & Mansbaach, 1973). Hellen V. Milner dan Edward D. Mansfield (1999) menyebutkan bahwa regionalisme terbagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama dipahami sebagai suatu kerjasama dalam berbagai bidang oleh negara – negara yang memiliki letak geografis berdekatan, Sedangkan jenis kedua adalah kerjasama yang berupa aktivitas *non-government* dan non-geografis sehingga kerjasama yang dilakukan dalam lingkup regional memiliki beragam bentuk dan tujuan (*Multipurpose Regional Organizations*). A. Leroy Bennet (1995) menyebutkan bahwa ASEAN merupakan sebuah organisasi di kawasan yang masuk ke dalam *Multipurpose Regional Organizations*. Bennet menjabarkan bahwa organisasi internasional yang masuk ke dalam kategori ini merupakan organisasi yang memiliki tujuan dan kegiatan yang luas serta beragam.

Pembentukan ASEAN terjadi atas upaya dalam menciptakan sebuah organisasi regional yang memiliki batas ruang lingkup dalam pemilihan anggota. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok melalui penandatanganan *ASEAN Declaration*. ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN hadir untuk memelihara perdamaian serta stabilitas hubungan antara negara – negara di Asia Tenggara. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan ASEAN semakin berkembang pada bidang politik dan ekonomi yaitu dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara.

Pengaplikasian teori organisasi regional dalam studi kasus yang penulis teliti dapat dilihat dari usaha Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai forum untuk membantu memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia serta mewujudkan digitalisasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menargetkan negara – negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina untuk bekerjasama dalam memfasilitasi masyarakat di negara tersebut untuk menggunakan pembayaran non – tunai dalam rangka memperkuat digitalisasi ekonomi ASEAN.

2. Digitalisasi Ekonomi

Istilah “digital” berasal dari kata digitus yang dalam Bahasa Yunani berarti jari – jemari serta merujuk pada jari tangan maupun kaki yang berjumlah sepuluh. Konsep ini kemudian berkembang dan berkaitan erat dengan sistem bilangan biner yang terdiri dari angka 1 dan 0 yang memiliki nilai numerik. Fisikawan kemudian menggunakan konsep ini untuk menandakan ada atau tidaknya arus listrik dalam transmisi dan

menciptakan “sinyal digital” yang bertindak seperti gelombang (Sulchan, Maslihatin, & Yulikah, 2021). Merujuk pada konsep tersebut, istilah digital kemudian digunakan untuk menyebutkan gelombang, maupun jaringan yang terhubung melalui komputer. Saat ini, masyarakat menggunakan frasa “zaman digital” untuk mengacu pada perubahan teknologi yang berbasis internet.

Digitalisasi merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang terjadi saat ini. Digitalisasi ditandai dengan adanya perubahan lingkungan yang berupa kemajuan teknologi dan informasi. Digitalisasi terjadi di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Ekonomi digital menjadi sebuah aspek ekonomi yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi dan informasi digital. Tapscott (1996) menjelaskan bahwa digitalisasi ekonomi merubah transaksi bisnis yang sebelumnya dilakukan secara langsung secara manual menjadi menggunakan internet.

Dalam hal digitalisasi, Indonesia mempunyai potensi untuk mengembangkan ekonomi digital sebab pengguna internet di Indonesia terus menerus mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Ekonomi digital juga berkembang pesat di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara – negara di kawasan Asia Tenggara kemudian memutuskan untuk saling bekerjasama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi mereka.

a. *Local Currency Settlement*

Melalui Bank Indonesia, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Malaysia dan Thailand untuk membahas mengenai kesepakatan ekonomi terkait penggunaan mata uang lokal sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan antara ketiga negara yang kemudian disebut dengan kerangka *Local*

Currency Settlement (LCS). LCS dibentuk dengan adanya komitmen – komitmen untuk menggunakan uang lokal negara yang terlibat untuk transaksi ekspor dan impor. Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), dan Bank of Thailand (BoT) menyepakati penggunaan uang lokal sebagai alat tukar dalam transaksi perdagangan antara ketiga negara tersebut.

Nota kesepahaman LCS ditandatangani pada 23 Desember 2016 di Bangkok oleh masing – masing gubernur bank (Supadi & Jamaan, 2021). Pada April 2019, keempat negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina menandatangani kesepakatan penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Settlement*) sebagai mata uang transaksi perdagangan bilateral (Rasdiyanti & Suyeno, 2022). Berlakunya LCS ditandai dengan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi yang terjadi. Penggunaan mata uang lokal juga akan semakin terpacu dengan adanya kerjasama antara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura dalam konektivitas pembayaran digital melalui QRIS.

b. *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS)

Kode QR (*Quick Response*) merupakan bentuk perkembangan dari barcode yang biasanya terdapat pada kemasan suatu produk. Dalam sebuah kode QR, memuat informasi yang dapat berisikan teks, gambar, maupun Alamat URL yang dapat di pindai melalui smartphone. Sedangkan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) merupakan penyatuan berbagai QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSJP) menggunakan Kode QR. Industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia

mengembangkan QRIS untuk memudahkan transaksi dengan Kode QR yang lebih terjaga keamanannya.

Dengan perubahan yang terjadi, penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menggunakan Kode QR wajib menerapkan QRIS. Oleh karena itu, QRIS saat ini dapat digunakan di seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank maupun non – bank. Transaksi melalui sistem QRIS menggunakan sumber dana yang berasal dari simpanan dana atau instrumen pembayaran yang dapat berupa kartu debit, maupun kartu kredit, maupun uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based* (Bank Indonesia, 2019). Sumber dana atau instrumen pembayaran yang digunakan dalam QRIS diterapkan berdasarkan usulan yang diberikan oleh Lembaga Standar yang disetujui oleh Bank Indonesia.

D. Hipotesa

Upaya Indonesia dalam mendukung digital ekonomi ASEAN di wilayah Asia Tenggara dilakukan melalui:

- a. Inisiasi Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina yaitu dengan memperluas penggunaan pembayaran digital melalui Kode QR.
- b. Penggunaan pembayaran digital *QRIS* melalui skema *Local Currency Transaction*.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka terkait motivasi awal serta upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mewujudkan digitalisasi ekonomi melalui ASEAN. Penulis juga mengaitkan upaya digitalisasi ekonomi Indonesia dengan skema *Local Currency Settlement* serta *Local Currency Transaction*

dalam mempermudah transaksi ekonomi melalui pembayaran digital.

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti peristiwa ini. Data – data yang dikumpulkan berasal dari berbagai publikasi – publikasi resmi yang bersumber dari publikasi penelitian maupun berbagai literatur yang diperoleh melalui jurnal, buku, maupun media sosial yang relevan serta dapat mendukung keaslian data pada penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diseleksi, dikategorisasi, diinterpretasi untuk kemudian dijelaskan dan dideskripsikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik *library research* atau penelitian kepustakaan.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membatasi fokus pembahasan yang diangkat. Hal ini dilakukan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tetap relevan dengan judul yang diambil oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian pada batasan waktu awal mula kerangka terkait digitalisasi ekonomi berlangsung, yaitu *Local Currency Settlement (LCS)*, yang disetujui oleh Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina pada 2016 hingga bergabungnya Singapura dalam kerangka *Local Currency Transaction* pada tahun 2022.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini menggunakan sebuah sistematika yang bertujuan untuk memfokuskan pokok – pokok pembahasan sesuai dengan judul yang diambil. Oleh karena itu, penulis membuah sebuah sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Bab I berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, teori, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan

- BAB II** : Bab II membahas mengenai digitalisasi ekonomi serta presentase penggunaan pembayaran digital baik di Indonesia maupun ASEAN
- BAB III** : Bab III membahas mengenai implementasi *Local Currency Transaction* serta kerjasama – kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan 4 negara ASEAN lainnya yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina dalam mewujudkan konektivitas pembayaran digital di kawasan Asia Tenggara
- BAB IV** : Bab IV merupakan bab yang berisikan kesimpulan. Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai poin – poin penting dari upaya Indonesia dalam memperluas penggunaan pembayaran digital *QRIS* di kawasan Asia Tenggara